

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Wali Kota Jakbar Perintahkan Razia Listrik di Permukiman

WALI KOTA Jakarta Barat Djoko Ramadhan menginstruksikan agar camat dan lurah segera merazia dan mendata instalasi listrik di permukiman padat penduduk di wilayah tersebut. Operasi itu terkait dengan maraknya kebakaran di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) yang diduga akibat hubungan arus listrik. "Jika ditemukan instalasi yang membahayakan atau menggunakan kabel yang tidak sesuai standar, segera dicabut karena akibatnya bisa fatal," ujar Djoko se usai mengunjungi lokasi kebakaran di Rawa Buaya, kemarin.

Kebakaran di permukiman padat di Jakbar yang diduga akibat hubungan arus listrik itu karena pemasangan instalasinya tidak tepat, tidak sesuai standar dan dipasang asal-asalan serta kurang perawatan.

Djoko meminta pendataan instalasi listrik tersebut sudah mulai berjalan awal bulan ini. Hal itu guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat kebakaran.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kebakaran Jakbar Sudjadi mengimbau warga supaya berhati-hati dalam menggunakan listrik. Ia menyebutkan penyebab kebakaran lainnya seperti kompor meledak dan lilin tidak sebesar akibat korsleting listrik. "Umumnya kebakaran disebabkan kelalaian masyarakat," katanya.

Karena itu, pihaknya berharap warga selalu memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi penyebab kebakaran. Usahakan selang kompor gas harus selalu dalam kondisi baik dan periksalah selalu kabel-kabel listrik. Jika ada kabel terkelupas, segera perbaiki. "Pencegahan kebakaran tidak hanya dari petugas tetapi juga peran serta masyarakat," ujarnya.

Sudjadi mengingatkan perlunya pengecekan berkala terhadap kabel-kabel yang sudah lecet akibat usang atau gigitan tikus. "Kalau tiba-tiba ada tikus menginjak kabel yang lecet, bisa jadi bakal timbul percikan api yang berujung pada kebakaran," jelasnya.

Kerugian akibat kebakaran di Jakbar meningkat drastis. Data Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakbar mencatat sepanjang 2007 telah terjadi 193 kali peristiwa kebakaran dengan total kerugian mencapai sekitar Rp53 miliar. Sedangkan pada 2008 dari Januari hingga Juli, terjadi sekitar 90 kasus kebakaran dengan jumlah kerugian lebih Rp61 miliar. (Jui/J-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Pekerja Keberatan Kerja Sabtu-Minggu

BANDUNG (MI): Saat menjelang pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri terkait pengalihan jam kerja menjadi Sabtu dan Minggu, masih diwarnai keberatan kalangan industri dan serikat pekerja di daerah.

Keberatan pelaksanaan SKB 5 Menteri tersebut datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan serikat pekerja Jawa Barat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cirebon, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

SKB 5 Menteri mengalihkan dua hari jam kerja dari Senin-Jumat menjadi Sabtu-Minggu dimaksudkan agar industri terhindar dari kebijakan pemadaman bergilir.

Ketua Kadin Jawa Barat (Jabar), Iwan Dermawan Hanafi mengatakan, persoalan pemberlakuan SKB 5 Menteri akan selesai setelah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Meski sudah ada pengusaha yang menerima pemberlakuan SKB, sebagian pekerjanya tetap menuntut Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. Ini yang menjadi permasalahannya. Meski demi-

kian, kami tetap berupaya menyelesaikannya dengan musyawarah," ujarnya.

Tuntutan para pekerja itu, menurut Iwan, hal yang wajar karena menyangkut masalah sosial. "Mereka (pekerja) tetap menginginkan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur," tutur Iwan.

Untuk mengetahui secara pasti persentase pengusaha dan pekerja yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Iwan mengaku akan melakukan investigasi sekaligus sosialisasi ke sejumlah pengusaha termasuk serikat pekerja tentang SKB 5 menteri.

"Rencananya dalam waktu dekat, kami dan PT PLT Distribusi Jabar dan Banten akan melakukan sosialisasi ke sejumlah pengusaha. Nantinya akan diketahui berapa pengusaha dan mitra kerjanya (buruh dan pekerja) yang mendukung SKB dan yang

tidak mendukung," kata Iwan.

Masih menunggu

Keberatan pelaksanaan SKB 5 menteri juga datang dari Apindo Cirebon.

"Masih ada beberapa perusahaan besar di Kota Cirebon yang tercantum dalam SKB yang keberatan," tutur Ketua Apindo Cirebon, Sutikno.

Karena itu, lanjut Sutikno, hingga kemarin pihaknya masih menunggu penjelasan dari PT PLN yang sudah menjanjikan akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan besar, Apindo, dan Pemerintah Kota Cirebon. "Saya berharap PT PLN bisa secepatnya memberikan penjelasan."

Di Surabaya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Erlangga Satriagung mengkhawatirkan berubahnya jam kerja pada Sabtu dan Minggu berakibat investor enggan masuk ke wilayah itu.

"Sekarang saja banyak investor yang masih menunggu saat yang tepat masuk karena kebijakan selalu berubah," kata Erlangga di Surabaya.

Ia mengemukakan banyak investor menanyakan perihal kebi-

jakan SKB itu, termasuk kebijakan pemadaman bergilir yang diterapkan PT PLN.

Bila tidak ada kebijakan yang baku, kata Erlangga, mereka ragu menanamkan modal ke Jatim. Karena bila terjadi kebijakan berubah-ubah bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Kalau kondisi ini terjadi terus, lanjutnya, yang rugi adalah Jawa Timur, padahal di tengah pengangguran yang terus meningkat, masuknya investor sangat dibutuhkan agar bisa merekrut tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Asisten Manajer PT PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Purwokerto, Marsupriyanto meminta pemerintah kabupaten untuk tidak berlebihan memasang lampu hias terkait peringatan Hari Kemerdekaan ke-63 RI. "Kita bisanya hanya mengimbau terutama penggunaan lampu-lampu hias yang diperkirakan bakal meningkat menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI supaya dikendalikan. Terutama pada hari Senin hingga Jumat. Kalau pada Sabtu dan Minggu, masih cukup pasokannya."

(FL/EM/IK/UL/LD/N-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AUGST</u> SEPT OKT NOV DES											
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : M8										TAHUN 2008	

Kalbar dukung PLN beli listrik

PONTIANAK: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung upaya PLN membeli listrik dari Sarawak Energy untuk mengatasi keterbatasan energi listrik di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan permohonan tertulis ke Menteri Energi Sumber Daya Manusia untuk keperluan tersebut. "Kami berharap kerja sama PLN dan Sarawak Energy dalam jangka waktu singkat. Dua atau tiga tahun saja, sampai PLN sudah mampu," katanya kemarin.

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat akan membeli energi listrik dari Sarawak Energy untuk memenuhi kebutuhan di dua pintu perbatasan, Badau (Kapuas Hulu) dan Sajingan (Sambas) dengan target realisasi awal 2009. Kebutuhan energi listrik di Badau sekitar 300 KW dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Di Sajingan, diperkirakan lebih cepat peningkatan kebutuhan energi listrik dibandingkan dengan Badau meskipun saat ini baru 100 KW.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Poerwono pada 10 Juli 2008 telah mengirimkan surat Nomor 1979/29/600.3/2008 tentang Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalbar dan salah satu isinya persetujuan pembelian listrik di perbatasan dari Sarawak. (ANTARA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 2008

PENGALIHAN WAKTU KERJA

**Surat Edaran Mennakertrans
Bingungkan Daerah**

BANDUNG, KOMPAS – Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.504/MEN/PHI KPHI/VII/2008 yang seharusnya menjadi petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Lima Menteri tentang Pengalihan Waktu Kerja membingungkan pelaksanaan di daerah.

"Ada pasal yang bertolak belakang dengan SKB Lima Menteri, yaitu kriteria perusahaan yang dikenai ketentuan pengalihan waktu kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Dadang Supardi, Kamis (31/7).

Dalam SKB Lima Menteri, perusahaan yang terkena ketentuan pengalihan waktu kerja adalah perusahaan yang beroperasi lima hari dan enam hari kerja. Namun, dalam SE Mennakertrans, perusahaan yang beroperasi selama enam hari dianggap sudah memenuhi ketentuan SKB Lima Menteri sehingga tidak perlu ada pengalihan waktu kerja.

Menurut Dadang, kalau merujuk ketentuan di SE Mennakertrans, hanya 13 perusahaan di Kabupaten Bandung yang terkena pengalihan waktu kerja karena beroperasi lima hari kerja.

Asisten Manajer Bidang Niaga PT PLN Area Pelayanan Jaringan Majalaya Basri Jamil mengungkapkan, dia sudah membuat jadwal pengalihan waktu kerja menurut SKB Lima Menteri. Jadi mencakup perusahaan yang beroperasi enam hari.

Di Yogyakarta, dari 51 industri yang masuk daftar pengalihan hari kerja dan pengurangan konsumsi listrik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baru 29 perusahaan yang bersedia.

Reffy Sangi, Ahli Madya Hukum dan Hubungan Masyarakat PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta, Kamis, mengatakan, pelaksanaan SKB Lima Menteri sesuai jadwal, yaitu awal Agustus.

Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia DIY Jadin C Jamaludin, anggotanya keberatan memberi uang lembur kepada karyawan sebagai konsekuensi pengalihan hari kerja ke hari Minggu.

Jadin juga menyayangkan, edaran dari PLN tentang jadwal pengalihan hari kerja hanya disampaikan secara lisan. Edaran seharusnya tertulis sehingga ada kejelasan bagi industri.

(ELD/ARA/PRA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

HEMAT ENERGI

Segera Ditandatangani SKB di Sektor Bisnis dan Ritel

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memastikan segera menandatangani surat keputusan bersama (SKB) soal hemat energi di sektor bisnis dan ritel. Ini termasuk apartemen serta perhotelan dan kantor swasta. Menurut rencana, SKB itu akan dirampungkan pekan depan. Untuk itu, rancangan SKB tersebut akan dibahas kembali Senin (4/8) mendatang dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang membina bisnis perhotelan.

"Otoritas implementasinya ada di daerah, tapi sebelum diteken tentu perlu dikomunikasikan dengan mereka (Depbudpar), dan bisa saja juga melibatkan Depbudpar. Mudah-mudahan segera diselesaikan," kata Direktur Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Ne-

geri Departemen Perdagangan, Gunaryo, di Jakarta, Kamis (31/7).

Penandatanganan SKB hemat energi kedua itu akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Gunaryo, saat ini masukan dari para pihak terkait sedang disempurnakan, namun intinya SKB itu mengatur tentang pengurangan konsumsi listrik saat beban puncak.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Subagyo sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak akan mengatur jam operasional pusat perbelanjaan dan mal mengingat mereka membutuhkan listrik sepanjang waktu. "Dalam SKB itu yang jelas ada poin-poin soal penggunaan AC minimal suhunya 25 derajat celsius, jam operasional

AC, dan ada pedoman kapan dinyalakan dan harus dimatikan lagi. Soal penggunaan lampu, eskalator dan lift juga akan diatur," ujarnya.

SKB baru ini menyusul SKB lima menteri sebelumnya yang mengatur mengenai pengalihan jam kerja industri ke hari libur. "Dengan SKB lima menteri yang sebelumnya, ternyata PLN hanya dapat menghemat 200 mega watt (MW), padahal defisitnya 600 MW. Karena itu, ada usulan untuk membuat acuan hemat listrik di sektor bisnis ini," ucapnya.

Terkait pelaksanaan pengalihan jam kerja ke Sabtu atau Minggu, PLN telah menandatangani kesepakatan dengan 1.500 industri di Jawa-Bali. Total pelanggan listrik industri PLN di Jawa Bali golongan I3 mencapai 6.856. Dari jumlah itu, yang hari kerjanya Senin-Jumat mencapai 3.052 pelanggan.

(Bayu/A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : #17 TAHUN 2008	

“Pengusaha Harus Penuhi Hak Buruh”

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz meminta para pengusaha memenuhi hak-hak normatif pekerja setelah kalangan industri menggeser hari kerja ke Sabtu-Minggu. “Perbedaan harus dibicarakan. Pengusaha harus bisa memenuhi hak-hak normatif pekerja,” ujarnya kemarin. Menurut dia, hak normatif tersebut di antaranya upah yang layak, jaminan kesehatan, cuti, dan uang lembur.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Djoko Wahjudi menolak jika pengalihan kerja ke Sabtu-Minggu dikatakan masuk kategori lembur. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan kerja 40 jam dalam sepekan dengan intensitas lima atau enam hari kerja. Dalam peraturan tersebut, kata dia, tidak disebut mana yang hari kerja dan mana yang hari lembur. “Ini hanya soal pindah hari kerja,” katanya.

Namun, kalangan pekerja menuntut pengalihan hari kerja ke hari libur ditetapkan sebagai lembur.

● ROFIUDDIN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 117

TAHUN 2008

Penghematan Listrik Sektor Bisnis Molor

Pengusaha minta kompensasi.

JAKARTA — Pemerintah menunda pembahasan rencana surat keputusan bersama menteri tentang penghematan listrik di kalangan pelanggan bisnis. Rencana, pembahasan kebijakan pemerintah rampung pekan ini. "Kami masih menerima masukan dari pengusaha," ujar Direktur Bina Pasar dan Industri Gunaryo kemarin.

Menurut Gunaryo, pembahasan masih membicarakan usul kalangan retail agar hotel dan apartemen dimasukkan dalam surat keputusan bersama. "Pengusaha meminta pengelola apartemen dan hotel menghemat penggunaan listrik," katanya. Dia menjelaskan, dengan usul tersebut, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata akan dilibatkan dalam pembahasan.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Subagyo, kalangan pelanggan bisnis juga minta kompensasi jika meng-

gunakan genset pada saat beban puncak. "Biaya penggunaan genset dibicarakan dalam pembahasan pekan depan," ujarnya. Pemerintah akan mengatur penggunaan listrik untuk eskalator, penerangan, penyejuk udara, dan reklame.

Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Tutum Rahanta menyatakan kalangan pengusaha terpaksa menerima kebijakan pemerintah tersebut. "Pengusaha pada posisi setuju-tidak setuju menerima kebijakan," katanya. Dia menjelaskan penggunaan genset akan menambah biaya pengusaha retail dan pengelola mal karena solar yang digunakan untuk genset merupakan solar industri, yang tidak disubsidi.

Pengusaha, kata dia, meminta pemerintah memberikan insentif berupa subsidi bahan bakar solar. "Seperti penyediaan solar yang harganya 50 persen lebih murah dari solar industri," ujar Tutum.

Menurut Tatum, kompensasi lainnya, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik

kepada pengusaha pengguna genset. "Seperti mempermudah dan meringankan biaya pembuatan izin pengadaan genset kepada pengusaha," katanya. Pengusaha retail dan pusat belanja bersedia membantu pemerintah dengan memberikan keringanan. "Jangan suruh kami (pengusaha) menanggung semuanya sendiri."

Pengelola Hotel Sahid, Haryadi Sukamdani, mengatakan pengelola hotel akan kesulitan memenuhi permintaan PLN agar pengusaha menggunakan genset saat beban puncak. Menurut dia, generator yang disediakan hanya untuk keadaan darurat. "Bukan untuk memasok listrik dalam waktu lama," ujarnya.

Dia mengatakan kemampuan pasokan listrik genset, yang hanya 8-10 jam, tidak bisa menyalakan seluruh peralatan listrik dengan maksimal. Haryadi meminta kejelasan pemerintah mengatur pengadaan investasi genset. "Khususnya masalah solar," katanya. ● CORNILA DESYANA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T 3

TAHUN 2008

Problem pasok listrik hambat ekspor Suzuki APV

Oleh AHMAD MUHIBBUDDIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Indomobil Suzuki International (ISI) kesulitan memenuhi permintaan model APV dari luar negeri karena tidak mampu meningkatkan produksi akibat pasokan listrik yang terbatas.

Presdir PT ISI Soebronto Laras mengungkapkan konsumen APV di Thailand saat ini

harus menunggu sekitar enam bulan untuk dapat memiliki model kendaraan buatan pabrik Suzuki di Indonesia karena kiriman unit mobil yang terbatas.

Untuk memperpendek masa tunggu tersebut, lanjutnya, ISI akan meningkatkan produksi kendaraan ini, tetapi terkendala oleh minimnya pasokan listrik dari PLN. "Kami ingin

menaikkan ekspor ke Thailand dari 1.000 unit menjadi 1.500 unit tidak bisa, karena kapasitas pabrik yang terbatas akibat pasokan listrik yang minim," katanya kemarin.

Dia menuturkan peningkatan alokasi produksi APV untuk pasar ekspor tidak dapat menggunakan lini produksi yang biasa digunakan untuk APV lokal karena karakter mo-

del APV yang dijual di luar negeri berbeda dengan yang dipasarkan di dalam negeri.

Di pasar domestik, jelasnya, APV dipasarkan dalam bentuk MPV (*multi purpose vehicle*) bermesin 1.500 cc, sedangkan APV untuk luar negeri bermesin 1.600 cc dalam bentuk MPV dan pikap.

"Untuk mengatasi pasokan listrik ini, kami akan meng-up

grade genset yang kami miliki. Ini harus dilakukan untuk memenuhi permintaan Thailand yang merupakan salah satu negara terbesar penjual APV."

Di dalam negeri, penjualan Suzuki APV pada semester I tercatat sebanyak 10.775 unit atau melonjak 89,70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya 5.680 unit. (22)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2008

Sektor petrokimia paling siap hadapi kenaikan tarif listrik

Oleh YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pengusaha petrokimia mengaku paling siap menghadapi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) industri kendati ada resistensi dari 13 asosiasi industri lain yang secara tegas menolak rencana tersebut.

Kenaikan TDL industri, menurut kajian Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (INApas), merupakan keputusan yang paling masuk akal dalam membantu mengurangi beban subsidi PLN.

Sekjen INApas Budi Susanto Sadiman mengatakan apabila PLN tidak segera menaikkan

TDL, industri petrokimia justru akan mengalami kekurangan pasokan daya listrik yang berdampak sangat fatal dalam jangka panjang, mengingat harga batu bara dan solar (bahan bakar PLN) telah melonjak sangat tinggi sepanjang semester I/2008.

Kenaikan harga bahan bakar listrik tersebut menyebabkan *cashflow* PLN terus tergerus sementara beban subsidi yang ditanggung BUMN kelistrikan tersebut semakin besar seiring dengan lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus US\$145 per barel. Kenaikan harga minyak me-

ngontrol harga komoditas pertambangan.

"Industri petrokimia adalah sektor padat modal. Apabila tarif listrik tidak naik, justru akan kontraproduktif terhadap kinerja industri ini. Kalau pasok listrik tersendat, industri petrokimia justru banyak yang runtuk," kata Budi, kemarin.

Seluruh perusahaan petrokimia nasional, ujarnya, saat ini telah menyetujui langkah PLN menaikkan TDL industri. Selama ini, sektor petrokimia hulu (*upstream*) dan antara (*midstream*) seperti etilena, propilena, pengolahan polietilena dan polipropilena, mendapatkan

harga listrik industri Rp570 per kilowatt hour (kWh).

Harga tersebut diakui INApas terlalu murah sehingga asosiasi ini tidak keberatan jika PLN menaikkan TDL untuk kedua subsektor petrokimia ini Rp900-Rp930 per kWh.

Di sektor hilir petrokimia seperti industri pengolahan plastik, paparnya, harga pembelian listrik industri bahkan telah mencapai Rp900 per kWh. Apabila dipukul rata, harga TDL di industri plastik, terutama yang beroperasi 24 jam, bahkan sudah mencapai Rp1.000 per kWh sejak enam bulan lalu mengingat ada tam-

bahan biaya saat beban puncak (pukul 17.00-22.00).

Dengan demikian, langkah kenaikan TDL industri merupakan cara yang paling masuk akal untuk menyelamatkan neraca keuangan PLN.

"Sebab, dengan patokan harga minyak mentah sekitar US\$120 per barel, subsidi PLN akan bertambah sekitar Rp21,8 triliun."

Dengan asumsi ini, apabila industri nasional menyetujui kenaikan TDL menjadi Rp900-Rp930 per kWh, sektor manufaktur akan membantu meringankan beban PLN sekitar 38% dari Rp21,8 triliun.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 74

TAHUN 2008

Multi Daya Prima bangun pembangkit di Palembang

BISNIS INDONESIA

PALEMBANG: Pemkot Palembang menggandeng PT Multi Daya Prima Elektrindo (MDPE) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sako di Kec. Kalidoni, Palembang dengan nilai US\$14 juta.

Pimpinan MDPE Arend Maramis mengatakan pembangunan PLTG itu diharapkan bisa memasok kebutuhan listrik di Kecamatan Kalidoni, Palembang sehingga masalah defisit listrik di kawasan itu minimal bisa dikurangi.

"Kapasitas PLTMG itu memang kecil, yakni hanya 20 kilowatt. Paling tidak, kebutuhan listrik di kecamatan ini bisa dipasok melalui PLTG itu," katanya Selasa.

Menurut dia, MDPE akan menjual tenaga listrik ini kepa-

da PLN dengan harga Rp500/kwh, sementara PLN menjualnya ke masyarakat Rp650/kwh.

Sementara itu, Sulisty, GM PLN Wilayah Sumsel, Jambi, Bengkulu (WS2JB) menambahkan beban puncak di Palembang sebesar 250 megawatt (MW). Selama ini, lanjutnya, PLN wilayah itu menerima pasokan dari sistem interkoneksi Sumatra melalui Lampung-NAD.

Dia menambahkan Palembang sempat mengalami defisit pasokan listrik sebesar 37 MW akibat kerusakan pembangkit pada sistem interkoneksi Sumatra.

"Pembangkit itu kini sedang diperbaiki. Mudah-mudahan Agustus dapat selesai sehingga Palembang tidak mengalami defisit lagi," ujarnya.

Dia menyatakan dengan adanya PLTMG Sako ini setidaknya dapat mengurangi defisit tersebut, dan pihaknya pun berharap investor dapat masuk lagi untuk mendanai proyek pembangkit, sebab kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah dinilai masih sangat sulit.

Dalam kerja sama ini, lanjut Sulisty, yakni berupa pembelian semua energi dari PT DPE oleh PLN. Meski margin yang didapat sangat tipis, karena naiknya harga gas, tetapi ke depan akan dikaji ulang kembali.

"Berapa angka pastinya akan kita kaji ulang kembali, pasca kenaikan gas beberapa minggu terakhir, jumlah pelanggan PLTMG sebanyak 27.570 KK yang terdapat di wilayah Kalidoni dan sekitarnya. (K49)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1 TAHUN 2008		

100 Perusahaan Mulai Alihkan Hari Kerja

Masih ada 1.552 perusahaan yang menolak program pengalihan hari kerja

Abdul Wahid Fauzie

JAKARTA. Program pengalihan hari kerja ke Sabtu dan Minggu untuk wilayah Jawa dan Bali diam-diam telah berjalan. Setidaknya, sebanyak 100 perusahaan sejak Kamis (31/7) mulai libur dan mulai mengatur produksi pada akhir pekan ini.

Kenyataan itu tentunya bertentangan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Ketika itu, Menkeu menegaskan pemberlakuan SKB pindah hari kerja mundur hingga dua minggu dari jadwal semula yang seharusnya mulai 31 Juli.

Rupanya PLN sudah tak sabar lagi kalau harus menunggu sampai pertengahan Agustus. Karena itu, menyusul 100 perusahaan tadi, PLN mencatat setidaknya sudah ada 1.500 perusahaan lain yang akan segera memberlakukan program ini. "Seluruh perusahaan yang terkena kewajiban sebanyak 3.052 perusahaan," kata Direktur Operasional PLN Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin, Kamis (31/7).

Ada yang masih menolak

Sayangnya, Murtaqi tidak mau menyebutkan jenis perusahaan apa yang mau menjalankan program ini. Yang pasti, 100 per-

usahaan tersebut tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Bali.

Jumlah perusahaan yang wajib mengalihkan hari kerja itu kurang dari separuh dari total jumlah pelanggan PLN, yang mencapai 6.856 perusahaan. Murtaqi menambahkan, saat ini masih ada sekitar 1.552 perusahaan yang belum sepakat dengan program ini.

Alasannya, mereka belum mensosialisasikan program ini kepada pekerja hingga masih menghitung konsekuensinya. "Namun, PLN akan bekerja keras agar perusahaan menerima," tutur Murtaqi.

Salah satu perusahaan yang mulai menjalankan program ini adalah PT Astra Daihatsu Motor. Perusahaan otomotif ini mendapat giliran mati listrik pada Senin, 4 Agustus 2008. "Kami sudah menyampaikan kepada pekerja dan 140 vendor kami," kata *Vice President Director* Astra Daihatsu Sudirman MR.

Meskipun begitu, tidak sedikit pula pengusaha yang menilai program ini masih menyimpan ganjalan. Antara lain soal upah lembur. Pengusaha masih menginginkan sikap tegas pemerintah soal upah lembur untuk pekerja yang beralih hari kerja.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 2		TAHUN 2008



Program Percepatan Listrik
 Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga dari kiri) dan Wakil Dirut PLN Rudi Antara bersama (kiri ke kanan) : Dirut BRI Sofyan Basir, Dirut BNI Gatot M Suwondo, Direktur Kredit Bank Mega Daniel Budirahaju, Direktur Treasury dan International Banking Bank Mega J.B Kendaro serta Dirut Bukopin Glen Glenardi saling bertumpu tangan usai penandatanganan pinjaman kredit untuk program percepatan pembangkit 10 ribu MW di Jakarta baru baru ini. PLN siap untuk membangun 13 PLTU bagian dari program 10 ribu Megawatt.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%;">MEI</td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%;">JUL</td><td style="width: 10%; text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN: 22 TAHUN 2008																																												

Pengusaha Ritel Minta Subsidi Genset

DIRJEN Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Subagyo menyatakan, penghematan SKB pergeseran hari kerja industri ternyata lebih kecil dibandingkan target semula, sehingga PLN akan memperluas program hemat listrik di sektor bisnis. Karena itu, Depdag, Departemen Dalam Negeri, Departemen ESDM sedang menggodok SKB sektor bisnis yang diharapkan rampung pekan depan.

Namun, lanjut dia, di sisi lain pengusaha ritel yang terkena aturan SKB 'jilid kedua' itu dibayangi kecemasan munculnya biaya ekstra. "Pengusaha ritel setuju saja (SKB jilid kedua), tapi harus ada perhitungan lebih lanjut tentang biaya. Pengusaha mengharapkan adanya subsidi pemerintah untuk genset karena menggunakan biaya solar industri yang relatif tinggi," ucapnya.

Pembahasan SKB jilid kedua itu difokuskan pada penghematan listrik di mal, kantor swasta, dan hotel. Tapi bukan tidak mungkin, kewajiban penghematan listrik itu juga akan menyasar kepada usaha restoran dan apartemen.

Direktur Bina Pasar dan Distribusi Depdag Gunaryo menerangkan, rancangan

SKB jilid kedua itu akan dibahas kembali pada Senin (4/8) dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang membina bisnis perhotelan. "Bisa saja (SKB melibatkan Depbudpar). Otoritas implementasinya ada di daerah tapi sebelum diteken, tentu perlu dikomunikasikan dengan mereka (Depbudpar)," katanya.

Dalam rancangan awal SKB penghematan listrik untuk sektor bisnis, dijelaskan bahwa mall dan pusat perbelanjaan, hotel, reklame, serta perkantoran swasta diwajibkan menghemat listrik antara lain dengan cara hanya boleh menggunakan pendingin ruangan (*air conditioner/AC*) pada suhu 25 derajat celcius, menghidupkan eskalator toko pada saat digunakan atau pada saat jumlah pelanggan tinggi, mengurangi penggunaan lampu dislai, serta menggunakan peralatan listrik yang hemat energi seperti lampu hemat energi. Sedangkan untuk bidang usaha reklame, diwajibkan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi dan papan reklame (*billboard*) hanya boleh dinyalakan sampai tengah malam (pukul 12.00 WIB). (c118)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 90										TAHUN 2008	

Mungkinkah Proyek 10.000 MW Atasi Krisis Listrik?

KRISIS energi listrik di Indonesia sudah di depan mata. Pemadaman terjadi di mana-mana. Pemerintah beralasan seringnya pemadaman listrik karena keterbatasan daya pembangkit, baik yang dimiliki PT PLN maupun swasta.

Total daya pembangkit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 29.705 megawatt (MW). Ini terdiri atas Jawa-Bali 22.302 MW dan luar Jawa-Bali 7.403 MW. Sebanyak 24.856 MW di antaranya merupakan milik PLN dengan komposisi Jawa-Bali 19.283 MW dan luar Jawa-Bali 5.573 MW. Sisanya milik swasta.

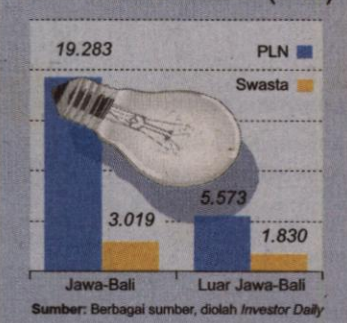
Keterbatasan daya pembangkit yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi pada 1998. Sejak krisis sampai saat ini, pembangkit yang dibangun PLN hanya sekitar 3.000 MW, sedangkan permintaan listrik mencapai 3.000 MW per tahun.

Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Wapres Jusuf Kalla maf-

hum dengan kondisi itu. Memasuki tahun kedua usia pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, pemerintah menggagas program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW untuk mengatasi krisis listrik di Tanah Air. Program ini butuh fulus yang tak sedikit memang. Manajemen PLN menaksir dana untuk pembangunan proyek 10.000 MW sedikitnya US\$ 8 miliar alias sekitar Rp 73,20 triliun. Beruntung, hingga pengujung Juli lalu, sebanyak US\$ 6,298 miliar (sekitar Rp 57,54 triliun) utang untuk proyek tersebut telah diperoleh.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Periode 2006-2010 PLN, di luar Jawa terdapat 30 proyek 10.000 MW dengan total kapasitas 1.998 MW. Sementara itu, di Pulau Jawa, proyek pembangkit listrik di bangun di empat provinsi, yaitu Banten (tiga pembangkit), Jawa Barat (dua), Jawa Tengah (dua), dan Jawa Timur (tiga). Total kapasitas 10 PLTU proyek listrik 10.000 MW

Total Daya Pembangkit di Seluruh Indonesia (MW)



di Jawa mencapai 6.900 MW.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengungkapkan, proyek 10.000 MW akan menjadi jawaban mengatasi krisis kelistrikan yang terjadi saat ini.

Proyek 10.000 MW akan menutupi kekurangan tambahan daya pembangkit yang terhambat pembangunannya akibat krisis ekonomi lalu. Krisis ekonomi telah membuat PLN kehilangan momentum membangun

pembangkit baru. "Dampaknya baru kita rasakan hari ini berupa krisis listrik di beberapa daerah," ujar Fahmi kepada *Investor Daily*, akhir pekan lalu.

Di sisi lain, menurut Fahmi, proyek 10.000 MW akan mengatasi ketimpangan antara harga penjualan listrik yang hanya Rp 626,86 per kWh dengan biaya produksi Rp 1.304 per kWh. Tingginya biaya produksi tersebut karena ketergantungan porsi BBM dalam bauran energi primer pembangkit masih tinggi, yaitu mencapai 34%, namun menghabiskan biaya hingga 78%.

Dengan dibangunnya proyek 10.000 MW, porsi BBM dalam bauran energi tinggal 3% yang juga menurunkan konsumsi biaya menjadi hanya 13%. Sebaliknya, porsi batubara pada 2010 akan mendominasi bauran energi primer pembangkit yakni mencapai 67% dengan biaya 51%.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW

Yogo Pratomo optimistis proyek tersebut tuntas 100% pada 2011. "Tiga PLTU di Jawa beroperasi tahun depan, yaitu Labuan, Rembang, dan Indramayu," katanya.

Saat ini, status 10 proyek yang berada di Jawa, adalah sembilan proyek berdaya 6.672 MW sudah menjalani tahap konstruksi dan satu proyek berdaya 600 MW berupa persiapan tender ulang. Sementara itu, dari 30 lokasi di luar Jawa, sebanyak 18 proyek berdaya 1.506 MW telah menandatangani kontrak pembangunan, tujuh proyek 449 MW telah menandatangani *letter of intent* (LoI), dan lima proyek lainnya 304 MW masih persiapan tender.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengakui, proyek 10.000 MW adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan target melistriki seluruh penduduk di pelosok Tanah Air. Untuk merealisasikannya, butuh proses dan tidak terjadi sekonyong-konyong. (dr/c122)